

**JURNAL TELAHAH & RISET AKUNTANSI***Vol. 3. No. 1. Januari 2010**Hal. 29-51*

**PENGARUH LIKUIDITAS DAN LEVERAGE  
TERHADAP KEMANDIRIAN DAERAH  
(STUDI TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2007 DI WILAYAH PROVINSI ACEH)**

**Waskito Hadi**

Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Aceh

**ABSTRACT**

*The research was conducted using secondary data of LKPD TA 2007 in Aceh Province which was proposed to understand the influence of liquidity and leverage towards regional autonomy using path analysis with census data partially and simultaneously.*

*The population of this research are audited financial statements of local government in Aceh (LKPD) for the budget year of 2007 by Supreme Audit Board of Indonesia (BPK- RI) Representatives Office in Aceh Province. The audit reports had been published widely through the official site of BPK- RI. The final population of this research were 14 financial statements of local government in Aceh. Using SPSS version 12, the result showed that the influence of liquidity towards regional autonomy was strong with the percentage 74,3%; whereas the percentage of leverage influence towards regional autonomy was 2,2 %. Simultaneous influence of liquidity and leverage towards regional autonomy was showed with determination coefficient value of 0,520. Finally, the percentage of influence of other variables towards regional autonomy ( $\epsilon$ ) was 0,480.*

*Based on the results, it can be concluded that liquidity and leverage have influence towards regional autonomy either simultaneously or partially.*

*Key words: liquidity, leverage and regional autonomy.*

## **1. PENDAHULUAN**

Munculnya paket undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah, yaitu Undang-Undang (UU) nomor 22 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah memberikan kewenangan yang luas terhadap pemerintah daerah untuk dapat menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Sebagai konsekuensinya maka setiap pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil dan merata serta berkesinambungan. Hal tersebut dilakukannya dengan mengelola semua potensi daerah, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya keuangan secara optimal.

Pengelolaan potensi daerah tersebut harus selalu dalam koridor semangat mewujudkan *good governance*, yakni suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan

negara yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif dengan menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas usaha secara luas. Upaya perwujudan *good governance* itulah sehingga muncul pula paket undang-undang keuangan negara guna mengatur pengelolaan keuangan negara baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang terdiri UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Implementasi lebih lanjut maka terbitlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang di dalamnya mengandung prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Hal tersebut tentunya mewajibkan setiap pemerintah daerah menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan yang berlaku.

Pemberlakuan paket undang-undang otonomi daerah dan keuangan negara tersebut tentunya dimaksudkan agar terciptanya suatu kemandirian daerah. Kemandirian daerah yang dimaksud adalah seberapa besar tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam hal pendanaan atau mendanai segala aktivitasnya. Sehubungan dengan itu, Haryanto (2007) menyatakan bahwa filosofi otonomi daerah adalah mewujudkan kemandirian daerah di segala segi kehidupan yang diukur melalui elemen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Harapan otonomi adalah semua daerah di Indonesia mampu melaksanakan semua urusan pemerintahan dan pembangunan dengan bertumpu pada PAD yang dimilikinya. Namun tujuan mulia otonomi daerah tersebut tampaknya bagaikan jauh panggang dari api. Bukan kemandirian yang dicapai justru ketergantungan terhadap pusat yang makin besar dikarenakan pencapaian PAD yang masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari Tabel 1 yang menunjukkan pencapaian PAD pada beberapa pemerintah daerah yang masih rendah dan proporsi DAU justru cenderung lebih tinggi dari proporsi PAD terhadap Total Pendapatan.

**Tabel 1.**  
**Proporsi PAD Dan DAU Terhadap Total Pendapatan TA 2007**

No	Pemerintah Daerah	Proporsi PAD	Proporsi DAU
1	Prov. Gorontalo	13,44%	55,87%
2	Prov. Nusa Tenggara Timur	22,65%	63,22%
3	Prov. Sulawesi Tengah	24,50%	63,35%
4	Prov. Kalimantan Tengah	25,66%	53,65%
5	Prov. Bangka Belitung	33,37%	52,36%
6	Prov. Nusa Tenggara Barat	38,08%	51,87%
7	Prov. Bengkulu	41,78%	53,02%
8	Prov. Papua	5,86%	14,86%
9	Prov. Riau Kepulauan	32,00%	32,74%
10	Prov. Sumatera Barat	44,60%	42,64%
11	Prov. Nanggroe Aceh Darussalam	19,50%	16,20%
12	Prov. DI Yogyakarta	37,40%	33,48%
13	Prov. Sumatera Selatan	39,70%	23,89%
14	Prov. Sulawesi Selatan	54,86%	33,11%

15	Prov. Riau	36,83%	8,14%
16	Prov. Sumatera Utara	63,07%	24,48%
17	Prov. Banten	68,02%	17,32%
18	Prov. Jawa Barat	70,26%	15,54%

Sumber : Data [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id) yang diolah.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

Biasanya laporan keuangan dapat dijadikan acuan mengukur kinerja keuangan suatu entitas dengan menggunakan analisis rasio dari angka-angka pada pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Dalam mengukur kinerja keuangan dengan analisis rasio atas laporan keuangan pemerintah tentunya berbeda dengan analisa keuangan pada sektor bisnis. Hal tersebut sudah tentu karena dalam kinerja pemerintah tidak terdapat "*net profit*" (istilahnya laba bersih). Analisis rasio yang berlaku bagi keuangan daerah akan sangat berbeda dengan analisis rasio pada perusahaan (bisnis) karena ciri yang melekat kuat pada Pemda yaitu tidak digunakan untuk menghitung laba yang akan diperoleh (Prasetya, 2005:47).

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta (Halim, 2002:127-130).

Beberapa rasio atau perbandingan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah yang dapat dipergunakan antara lain:

- a. *Likuiditas*  
Digunakan untuk mengukur kemampuan pemda untuk membayar utang (kewajiban) jangka pendeknya.
- b. *Leverage*  
Digunakan untuk mengukur perbandingan antara ekuitas dana (kekayaan bersih pemda) dengan total utang (STAN, 2007 : 107-109).

Kaitan logis antara likuiditas dan *leverage* dengan kemandirian daerah adalah terletak pada keadaan posisi kewajiban yang dimiliki pemerintah daerah. Pengukuran kemandirian daerah tidak terlepas dari ada tidaknya posisi kewajiban pemerintah daerah dalam membiayai semua urusan pemerintahan dan pembangunan pada suatu daerah.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut, maka peneliti mengangkat penelitian dengan judul "**Pengaruh Likuiditas dan Leverage Terhadap Kemandirian Daerah (Studi Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2007 di Wilayah Provinsi Aceh)**".

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan tersebut, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah terdapat pengaruh dan seberapa besar pengaruh likuiditas dan *leverage* secara bersama-sama terhadap kemandirian daerah di Provinsi Aceh;
- b. Apakah terdapat pengaruh dan seberapa besar pengaruh likuiditas terhadap kemandirian daerah di Provinsi Aceh;
- c. Apakah terdapat pengaruh dan seberapa besar pengaruh *leverage* terhadap kemandirian daerah di Provinsi Aceh.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Ada tidaknya dan besar pengaruh likuiditas dan *leverage* secara bersama-sama terhadap kemandirian daerah di Provinsi Aceh;
- b. Ada tidaknya dan besar pengaruh likuiditas terhadap kemandirian daerah di Provinsi Aceh;
- c. Ada tidaknya dan besar pengaruh *leverage* terhadap kemandirian daerah di Provinsi Aceh.

Penelitian ini diharapkan nantinya akan dapat bermanfaat seoptimal mungkin baik dalam segi keilmuan maupun dalam segi operasional. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Keilmuan  
Menjadi bahan referensi bagi penelitian – penelitian selanjutnya yang tertarik dengan pokok bahasan keuangan pemerintahan.
- b. Operasional  
Menjadi pertimbangan bagi entitas pemerintahan untuk mengembangkan analisis rasio keuangan untuk pengukuran kinerja keuangan pemerintahan.

## **2. TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

### **Likuiditas**

Likuiditas dan *leverage* merupakan bagian dari analisis rasio laporan keuangan. Analisis Rasio merupakan teknik analisis yang dilakukan dengan membandingkan suatu perkiraan dengan perkiraan yang lain dalam laporan keuangan yang sama. Metoda analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan realisasi anggaran secara individu ataupun kombinasi dari kedua laporan tersebut. Fungsi analisis rasio sendiri adalah sebagai alat identifikasi kekuatan dan kelemahan suatu organisasi/perusahaan dan juga sebagai peringatan terhadap kehadiran suatu masalah.

Umumnya, kreditor dan calon kreditor ingin terus memonitor kemampuan entitas pemerintah daerah untuk membayar bunga dan pokok pinjaman saat jatuh tempo. Dalam konteks ini, analisis rasio likuiditas menghasilkan indikator kemampuan pembayaran utang jangka pendek pemerintah daerah (Prasetya, 2005:47). Bagi perusahaan swasta (lembaga yang bersifat komersial), umumnya rasio likuiditas dapat menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan segera (Halim, 2007:231).

Sedangkan dalam sektor publik khususnya pemerintah daerah, perhitungan rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membayar utang (kewajiban) jangka pendeknya. Rasio likuiditas ini biasa diukur dengan 2 perhitungan rasio, yakni rasio lancar dan rasio kas (terhadap utang jangka pendek). Pos persediaan pada neraca pemerintah daerah umumnya bukan merupakan persediaan barang dagangan yang ditujukan untuk dijual, akan tetapi untuk digunakan dalam operasional pemerintahan atau diserahkan

kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam perhitungan rasio lancar sebaiknya tidak memperhitungkan pos persediaan.

Rasio lancar menunjukkan perbandingan antara aktiva lancar (di luar persediaan) dengan utang jangka pendek. Sedangkan rasio kas menunjukkan perbandingan yang lebih likuid dari rasio lancar (STAN, 2007:107). Rumus perhitungan rasio likuiditas yang terdiri dari rasio lancar dan rasio kas tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva Lancar - Persediaan}}{\text{Utang Jangka Pendek}}$$

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Kas dan Setara Kas}}{\text{Utang Jangka Pendek}}$$

### **Leverage**

Istilah *leverage* lebih sering digunakan di sektor swasta. *Financial leverage* menggambarkan kemampuan perusahaan memanfaatkan aktiva untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya secara menyeluruh (Avianti, 2000:30;138). Bagi perusahaan swasta atau lembaga yang bersifat komersial umumnya menggunakan rasio *leverage* untuk mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemilik dengan dana yang dipinjam perusahaan dari kreditur (Halim, 2007:231).

Pada sektor publik khususnya entitas pemerintah daerah, rasio *leverage* ini digunakan untuk mengukur perbandingan antara ekuitas dana (kekayaan bersih pemerintah daerah) dengan total utang. Memang rasio *leverage* selama ini hanya digunakan di sektor perusahaan untuk mengukur komposisi sumber pembiayaan yang berasal dari kreditur dan investor. Di pemerintah daerah, rasio *leverage* ini mungkin belum merupakan rasio yang penting, dikarenakan utang daerah yang masih relatif kecil (STAN, 2007:108). Rumus perhitungan rasio *leverage* adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Leverage} = \frac{\text{Total Ekuitas Dana}}{\text{Total Utang}}$$

### **Kemandirian Daerah**

Kemandirian daerah merupakan bagian dari alat ukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Yeremias (2008) menjelaskan bahwa kinerja keuangan merupakan suatu standar untuk menilai kemampuan lembaga pemerintah mendanai input dan dari sampai seberapa jauh lembaga pemerintahan mengikuti proses serta target yang telah ditentukan, tetapi sangat minim perhatian diberikan kepada pencapaian hasil akhir atau tujuan. Tradisi ini dapat diamati dari upaya-upaya lembaga pemerintahan selama ini khususnya dalam penyediaan dana dan sarana serta fasilitas program atau proyek, kepatuhan suatu lembaga terhadap berbagai aturan dan prosedur formal, dan perluasan jangkauan kelompok sasaran atau penerima program atau proyek. Lebih lanjut menurut Soepomo (2007) bahwa kinerja keuangan merupakan suatu aktivitas bagaimana pemerintah melaksanakan aktivitas

keuangan dalam suatu periode akuntansi dan bagaimana kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku.

Rasio Kemandirian digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam hal pendanaan aktivitasnya. Rasio ini dapat diukur dengan membandingkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah jumlah pinjaman (selain Utang PFK dan Utang Pajak PPN/PPH). DAU merupakan dana yang berasal dari APBN yang ditransfer ke pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. DAU masih merupakan sumber pembiayaan yang utama (andalan) bagi pemerintah daerah pada umumnya. Dengan demikian dapat dikatakan bila perbandingan sumber pembiayaan dari PAD terhadap DAU semakin besar, berarti hal ini menunjukkan tingkat kemandirian yang semakin meningkat pula. Bila pinjaman jumlahnya dianggap material, maka untuk mengukur kemandirian unsur pinjaman tersebut harus diperhitungkan, akan tetapi sebaiknya mengeluarkan Utang PFK dan Utang Pajak Pusat sebab kedua jenis utang tersebut tidak dimaksudkan untuk menambah sumber pendanaan pemerintah daerah (STAN, 2007:108). Rumus perhitungan rasio kemandirian tersebut adalah:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{DAU} + (\text{Utang} - \text{Utang PFK} - \text{Utang Pajak Pusat})}$$

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya bahwa semakin rendah rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin tinggi. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, maka semakin tinggi partisipasi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD (Halim, 2007:233).

Paul Hersey dan Kenneth Blanchard (Halim, 2001:168) mengemukakan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu sebagai berikut:

- a. Pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial);
- b. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah;
- c. Pola hubungan partisipatif, yaitu pola dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. Peran pemberian konsultasi beralih ke peran partisipasi pemerintah pusat;
- d. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Pemerintah pusat siap dan dengan keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah.

Pola hubungan pemerintah pusat dan daerah serta tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah dapat disajikan dalam matriks seperti tampak pada Tabel 2 berikut ini.

**Tabel 2**  
**Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah**

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Rasio Kemandirian (%)</b>	<b>Pola Hubungan</b>
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	> 25 – 50	Konsultatif
Sedang	> 50 – 75	Partisipatif
Tinggi	> 75 – 100	Delegatif

Sumber : Halim (2001)

### **Hubungan antara Likuiditas dengan Kemandirian Daerah**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa perhitungan rasio likuiditas pada suatu pemerintah daerah digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membayar utang (kewajiban) jangka pendeknya. Salah satu indikator pengukuran likuiditas adalah menggunakan rasio lancar yang menunjukkan perbandingan antara aktiva lancar (di luar persediaan) dengan utang jangka pendek.

Pengukuran kemandirian daerah menggunakan indikator rasio kemandirian. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Sumber dana eksternal yang dimaksud selain DAU adalah unsur pinjaman yang harus turut diperhitungkan selain Utang PFK dan Utang Pajak Pusat sebab kedua jenis utang tersebut tidak dimaksudkan untuk menambah sumber pendanaan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut maka secara logika terdapat hubungan antara likuiditas dengan kemandirian daerah, yakni semakin tinggi tingkat likuiditas berarti semakin kecil unsur utang sehingga semakin menaikkan tingkat kemandirian daerah dengan tidak terbebani daerah dengan sumber dana eksternal dari pinjaman atau utang.

### **Hubungan antara *Leverage* dengan Kemandirian Daerah**

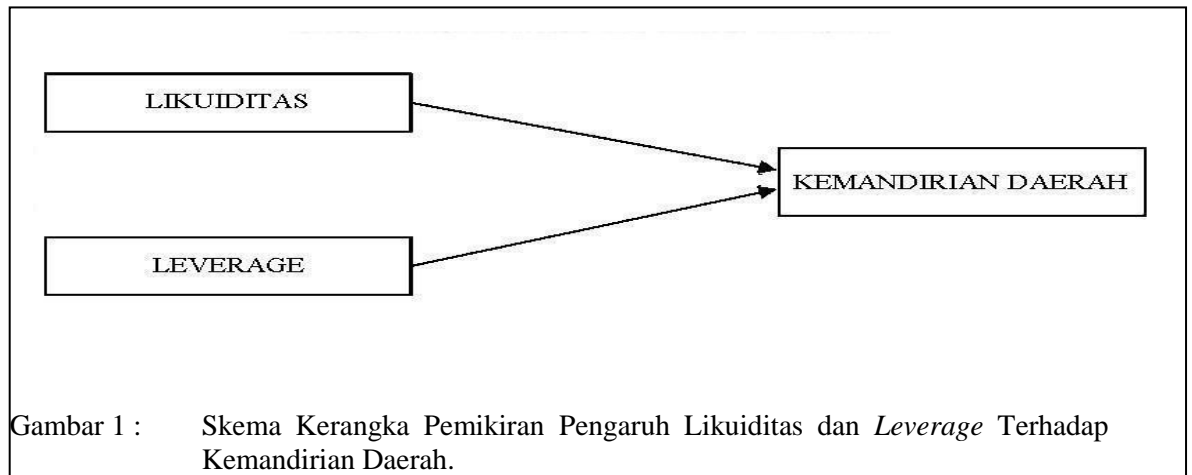
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa perhitungan rasio *leverage* pada suatu pemerintah daerah digunakan untuk mengukur perbandingan antara ekuitas dana (kekayaan bersih pemerintah daerah) dengan total utang.

Rasio kemandirian sebagai indikator pengukuran kemandirian daerah dapat menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Sumber dana eksternal yang dimaksud selain DAU adalah unsur pinjaman yang harus turut diperhitungkan selain Utang PFK dan Utang Pajak Pusat sebab kedua jenis utang tersebut tidak dimaksudkan untuk menambah sumber pendanaan pada pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut maka secara logika terdapat hubungan antara *leverage* dengan kemandirian daerah, jika dipandang dari sisi keberadaan utang atau pinjaman sebagai sumber pendanaan eksternal pemda. Semakin mampu menutup utang dengan ekuitas dana yang dimiliki berarti semakin kecil unsur utang sehingga semakin menaikkan tingkat kemandirian daerah dengan tidak terbebani daerah dengan sumber dana eksternal berupa pinjaman atau utang.

Berdasarkan kerangka teoritis yang dikembangkan menjadi suatu kerangka pemikiran dalam penelitian tentang pengaruh likuiditas dan *leverage* terhadap kemandirian

daerah ini, maka dapat digambarkan dalam diagram skematis kerangka pemikiran sebagaimana Gambar berikut ini.



Gambar 1 : Skema Kerangka Pemikiran Pengaruh Likuiditas dan *Leverage* Terhadap Kemandirian Daerah.

Penelitian-penelitian sebelumnya yang dijadikan referensi dan berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

- 1) Kemandirian Daerah Sebuah Perspektif Dengan Metode Path Analysis, oleh Joko Tri Haryanto pada tahun 2007.
- 2) Analisis Rasio Keuangan APBD Untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kabupaten Maluku Tenggara), oleh Ruslina Nadaek pada tahun 2003.
- 3) Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Dalam Masa Otonomi Daerah Tahun 2000-2004, oleh Tri Suprpto pada tahun 2006.
- 4) Efektifitas Dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota Di Propinsi Bali Tahun 2002-2006, oleh A.A.N.B. Dwirandra pada tahun 2006.

Berdasar penelitian sebelumnya tersebut antara lain memberikan saran yang kemudian dijadikan landasan pemikiran dalam penelitian ini, yakni:

- a. Mengganti atau menambah variabel penelitian.
- b. Mencari variabel lain yg mempengaruhi kemandirian daerah.

### Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teoritis dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- a. Terdapat pengaruh secara simultan likuiditas dan *leverage* terhadap kemandirian daerah di Provinsi Aceh;
- b. Terdapat pengaruh rasio likuiditas terhadap rasio kemandirian daerah di Provinsi Aceh;
- c. Terdapat pengaruh rasio *leverage* terhadap rasio kemandirian daerah di Provinsi Aceh.

## 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini yaitu terdiri sumber data, desain penelitian, populasi penelitian, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel dan metode analisis data untuk menguji hipotesis yang diajukan.



## **Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yakni berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2007 di Provinsi Aceh yang telah diaudit oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Aceh dan hasil auditnya telah dipublikasikan di situs resmi BPK-RI yakni pada website [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id) yang bisa diakses secara umum oleh semua pihak (masyarakat luas/publik).

## **Desain Penelitian**

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menelaah enam aspek dasar, yaitu tujuan studi, jenis investigasi, tingkat intervensi peneliti, konteks studi, unit analisis dan horizon waktu. Penelitian ini mempunyai tujuan studi berupa pengujian hipotesis yakni untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jenis investigasi dalam penelitian ini adalah studi korelasional dengan berusaha melihat pengaruh likuiditas dan *leverage* terhadap kemandirian daerah. Tingkat intervensi peneliti dalam penelitian ini berkaitan dengan jenis investigasi yang dipilih berupa studi korelasional yang dilakukan dalam lingkungan alami organisasi dengan intervensi yang minimum oleh peneliti. Tingkat intervensi minimal adalah mempelajari peristiwa sebagaimana adanya. Konteks studi dalam penelitian ini juga berkaitan dengan jenis investigasi yang dipilih yakni studi korelasional. Pada studi korelasional selalu dilakukan dalam konteks studi atau dalam situasi yang tidak diatur.

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya. Tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data dalam penelitian ini menggunakan unit analisis pada tingkat entitas organisasi pemerintahan daerah. Horizon waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data pada satu batas waktu yang disebut studi *cross-sectional* yaitu data-data berupa laporan keuangan yang diaudit BPK-RI pada beberapa entitas dikumpulkan secara sekaligus atau hanya sekali dikumpulkan.

## **Populasi Penelitian**

Populasi penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2007 di wilayah Provinsi Aceh yang telah diaudit oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Aceh dan hasil auditnya telah dipublikasikan dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Laporan keuangannya lengkap terdiri neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan;
- 2) Menyampaikan laporannya secara resmi kepada BPK-RI Perwakilan Provinsi Aceh untuk diaudit dan selanjutnya mendapatkan opini audit atas laporan keuangan;
- 3) Terdapat saldo pada akun kewajiban pada neraca per 31 Desember 2007.

Setelah melalui seleksi, berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa dari 24 pemda di wilayah Provinsi Aceh yang meliputi 1 pemda provinsi, 5 kota dan 18 kabupaten, serta dari jumlah LKPD TA 2007 yang telah diaudit dan mendapat opini audit atas laporan keuangan terdiri sebanyak 22 pemda meliputi 1 pemda provinsi, 4 kota dan 17 kabupaten karena 1 kota dan 1 kabupaten merupakan daerah pemekaran baru yang pada TA 2007 belum menyampaikan laporan keuangan. LKPD TA 2007 yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini, terutama kriteria keempat yakni terdapat saldo pada akun kewajiban pada neraca per 31 Desember 2007 berjumlah 14 pemda. Atas dasar tersebut, dalam penelitian ini seluruh elemen populasi diteliti dengan sasaran akhir populasi pada penelitian ini adalah sebanyak 14 LKPD TA 2007 di wilayah Provinsi Aceh yang terdiri Pemerintah Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, Sabang dan Langsa serta Kabupaten Aceh Besar, Bireuen,

Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Aceh Selatan dan Simeulue (lihat Lampiran 1).

### Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data diantara yang tersedia yakni meliputi wawancara, kuesioner dan observasi, maka dalam penelitian ini menggunakan metode observasi. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui observasi mekanis. Observasi mekanis adalah dengan bantuan mesin untuk menyediakan data dengan catatan peristiwa tanpa kehadiran peneliti secara fisik pada obyek penelitian. Salah satu jenis yang digunakan dalam observasi mekanis ini adalah melalui kunjungan pada situs Web. Situs yang digunakan dalam penelitian ini yakni [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id) (situs resmi BPK-RI). Data yang diobservasi secara mekanis tersebut bebas bias (Sekaran, 2006:107).

### Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengoperasionalkan atau secara operasional mendefinisikan sebuah konsep agar dapat diukur. Adapun definisi operasional variabel yang dimaksud pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel Definisi Operasional Variabel, berikut ini.

**Tabel 3**  
**Definisi Operasional Variabel**

No	Variabel	Konsep	Indikator	Skala
1	2	3	4	5
1	Kemandirian Daerah (Y)	Kemandirian daerah yang dimaksud adalah seberapa besar tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam hal pendanaan atau mendanai segala aktivitasnya.	Rasio Kemandirian Daerah	Rasio
2	Likuiditas ( $X_1$ )	Likuiditas merupakan kemampuan entitas untuk membayar utang (kewajiban) jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang dimilikinya.	a. Rasio Lancar b. Rasio Kas	Rasio
3	Leverage ( $X_2$ )	Leverage merupakan kemampuan entitas dalam mengukur perbandingan antara ekuitas dana (kekayaan bersih pemerintah daerah) dengan total utang	Rasio <i>Leverage</i>	Rasio

### Metode Analisis Data

Penelitian ini menguji dan menganalisis pengaruh likuiditas dengan rasio lancar ( $X_1$ ) dan *leverage* ( $X_2$ ) terhadap kemandirian daerah (Y) dengan menggunakan *standardized multiple regression model* (model regresi berganda yang distandarkan) (Li, 1975:108). Penelitian ini menggunakan model tersebut karena penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh likuiditas dengan rasio lancar ( $X_1$ ) dan *leverage* ( $X_2$ ) terhadap kemandirian daerah (Y), tetapi juga lebih jauh lagi yakni untuk mengetahui besarnya pengaruh likuiditas dengan rasio lancar ( $X_1$ ) dan *leverage* ( $X_2$ ) terhadap kemandirian daerah (Y), baik secara bersama-sama maupun secara parsial. Pengujian parsial bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

Pengujian simultan bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Oleh karena penelitian ini menggunakan metode sensus, maka tidak dilakukan uji signifikansi, baik uji-*t* untuk pengaruh secara parsial maupun uji-*F* untuk pengaruh secara bersama-sama. Kesimpulan diambil langsung dari nilai koefisien jalur masing-masing variabel independen serta koefisien determinasi, baik secara parsial maupun secara bersama-sama (Arfan, 2006:143).

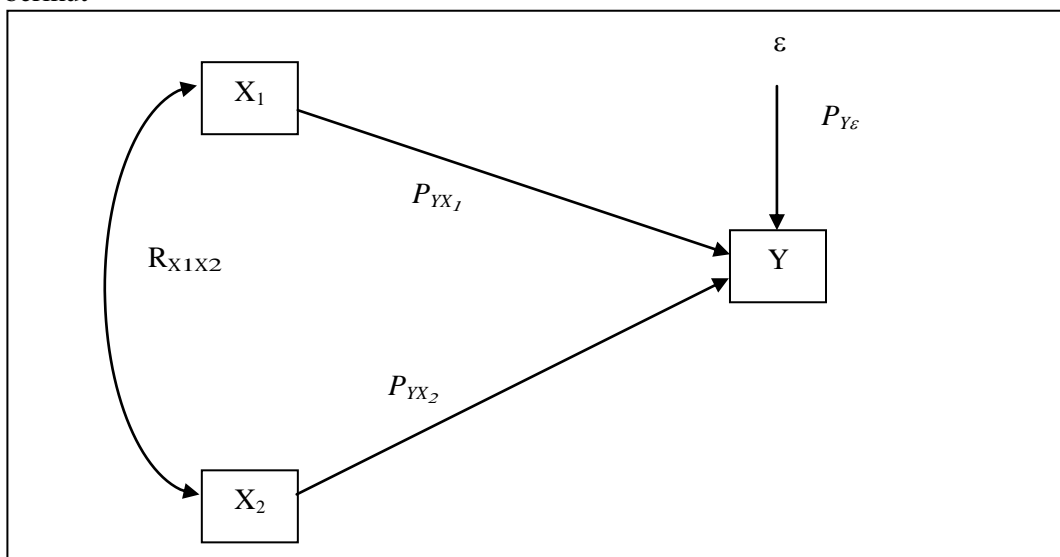
Model regresi berganda yang distandarkan dalam literatur juga dinamakan analisis jalur (*path analysis*) (Li, 1975:101). Analisis jalur merupakan analisis regresi yang menggunakan hubungan di antara variabel-variabel yang distandarkan (*standardized variables*) (Li, 1975:101). Model regresi berganda yang distandarkan dengan menggunakan analisis jalur dalam penelitian ini dapat diformulasikan melalui persamaan sebagai berikut:

$$Y = P_{YX_1}X_1 + P_{YX_2}X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y	= Kemandirian Daerah (variabel dependen)
$P_{YX_1}$ dan $P_{YX_2}$	= Koefisien regresi yang distandarkan (koefisien jalur)
$X_1$	= Likuiditas rasio lancar
$X_2$	= <i>Leverage</i>
$\varepsilon$	= Variabel lain yang mempengaruhi Y

Pengaruh likuiditas dengan rasio lancar ( $X_1$ ) dan *leverage* ( $X_2$ ) terhadap kemandirian daerah (Y) ini dapat digambarkan dengan skema model struktur sebagaimana Gambar 2 berikut



Gambar 2 : Skema Model Struktur Pengaruh Likuiditas Rasio Lancar ( $X_1$ ) dan *Leverage* ( $X_2$ ) terhadap Kemandirian Daerah (Y)

Pengujian hipotesis pertama ( $H_1$ ), yaitu pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan hipotesis nol ( $H_0$ ) dan hipotesis alternative ( $H_A$ ) sebagai berikut:  
 $H_{01}$ :  $R^2 = 0$ ; Likuiditas rasio lancar dan *leverage* secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kemandirian daerah.  
 $H_{A1}$ :  $R^2 \neq 0$ ; Likuiditas rasio lancar dan *leverage* secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemandirian daerah.

2. Menentukan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis.

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:

Jika  $R^2 = 0$ :  $H_0$  tidak dapat ditolak

Jika  $R^2 \neq 0$ :  $H_0$  ditolak

$H_0$  tidak dapat ditolak artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, sedangkan  $H_0$  ditolak berarti variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Besar pengaruh likuiditas dengan rasio lancar ( $X_1$ ) dan *leverage* ( $X_2$ ) secara bersama-sama terhadap kemandirian daerah (Y) ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi ( $R^2$  atau *R Square*). Nilai koefisien determinasi terletak dalam interval  $0 \leq R^2 \leq 1$ . Apabila  $R^2$  semakin mendekati 1 berarti semakin besar proporsi sumbangan variabel independen secara bersama-sama dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Sebaliknya apabila  $R^2$  semakin mendekati nol berarti semakin kecil proporsi sumbangan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Pengujian pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan hipotesis nol ( $H_0$ ) dan hipotesis alternative ( $H_A$ ).

Hipotesis kedua ( $H_2$ )

$H_{02} : P_{YX1} = 0$ ; Likuiditas rasio lancar tidak berpengaruh terhadap kemandirian daerah.

$H_{A2} : P_{YX1} \neq 0$ ; Likuiditas rasio lancar berpengaruh terhadap kemandirian daerah.

Hipotesis ketiga ( $H_3$ )

$H_{03} : P_{YX2} = 0$ ; *Leverage* tidak berpengaruh terhadap kemandirian daerah.

$H_{A3} : P_{YX2} \neq 0$ ; *Leverage* berpengaruh terhadap kemandirian daerah.

2. Menentukan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis.

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:

Jika  $P_{YXi}$  ( $i=1$  dan  $2$ ) = 0:  $H_0$  tidak dapat ditolak

Jika  $P_{YXi}$  ( $i=1$  dan  $2$ )  $\neq 0$ :  $H_0$  ditolak

$H_0$  tidak dapat ditolak artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, sedangkan  $H_0$  ditolak berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Besar pengaruh likuiditas dengan rasio lancar ( $X_1$ ) dan *leverage* ( $X_2$ ) terhadap kemandirian daerah (Y) ditunjukkan oleh koefisien determinasi masing-masing variabel independen. Nilai koefisien determinasi masing-masing variabel dihitung dengan cara mengkuadratkan koefisien jalur masing-masing variabel independen tersebut ( $P_{YXi}^2$ ). Koefisien determinasi terletak dalam interval  $0 \leq P_{YXi}^2 \leq 1$ . Apabila  $P_{YXi}^2$  semakin mendekati 1 berarti semakin besar proporsi sumbangan variabel independen secara parsial dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Sebaliknya apabila  $P_{YXi}^2$  semakin mendekati 0 berarti semakin kecil proporsi sumbangan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Nilai koefisien jalur masing-masing variabel independen dapat diperoleh dengan bantuan aplikasi program dengan program aplikasi *SPSS (Statistical Product and Service Solution)* yang sebelumnya disebut *Statistical Package for the Social Sciences* versi 12. Hasilnya dapat dilihat pada *output coefficients*, kolom *standardized coefficients* (beta).

Penentuan besar pengaruh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini ( $\varepsilon$ ) dihitung dengan cara sebagai berikut (Loether dan McTavish, 1993:331):

$$\varepsilon = 1 - R^2$$

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### Hasil Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan untuk dianalisis dalam penelitian ini sesuai dengan variabel penelitiannya adalah likuiditas dengan rasio lancar ( $X_1$ ), *leverage* ( $X_2$ ) dan kemandirian daerah (Y). Semua data yang dibutuhkan untuk analisis tersebut merupakan data sekunder dan menggunakan skala rasio. Sumber datanya adalah berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2007 di wilayah Provinsi Aceh yang telah diaudit oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Aceh dan hasil auditnya telah dipublikasikan. Setelah dilakukan seleksi terhadap kriteria data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka dari 24 pemda di wilayah Provinsi Aceh dan dari jumlah LKPD TA 2007 yang telah diaudit dan mendapat opini audit atas laporan keuangan adalah sebanyak 22 pemda meliputi 1 pemda provinsi, 4 kota dan 17 kabupaten. Dari jumlah LKPD TA 2007 tersebut yang dapat memenuhi kriteria dalam penelitian ini dan kemudian menjadi sasaran akhir populasi berjumlah 14 pemda (lihat Lampiran 1).

Hasil perhitungan likuiditas dengan menggunakan rasio lancar dan rasio *leverage* yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel.

**Tabel 4**  
**Hasil Perhitungan Rasio Likuiditas dan *Leverage***

(dalam kali)

No	Pemerintah Daerah	Likuiditas (Rasio Lancar)	Rasio <i>Leverage</i>
1	Provinsi NAD	990,29	3.697,07
2	Kota Sabang	124,48	1.022,47
3	Kota Banda Aceh	12,37	631,22
4	Kabupaten Bireuen	1,11	20,38
5	Kabupaten Aceh Besar	8,03	121,75
6	Kabupaten Aceh Barat	24.035,33	573.945,55
7	Kabupaten Aceh Selatan	3,45	44,31
8	Kota Langsa	3,71	75,37
9	Kabupaten Gayo Lues	1,02	9,90
10	Kabupaten Aceh Utara	2.897,11	6.805,24
11	Kabupaten Aceh Tenggara	0,76	17,97
12	Kabupaten Aceh Tengah	298,81	1.282,30
13	Kabupaten Aceh Tamiang	30,89	86,58
14	Kabupaten Simeulue	297,89	3.965,76

Sumber : Data Sekunder LKPD TA 2007 yang diolah.

Hasil perhitungan rasio kemandirian daerah pada Tabel 4 memberikan diskripsi tentang pola hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah serta tingkatan kemampuan keuangan, sebagaimana diklasifikasikan Paul Hersey dan Kenneth Blanchard.

**Tabel 5**  
**Daftar Rasio Kemandirian Daerah, Pola Hubungan**  
**dan Tingkatan Kemandirian Keuangan Daerah**

No	Pemerintah Daerah	Rasio Kemandirian Daerah	Pola Hubungan	Kemandirian Keuangan
1	Provinsi NAD	119,61%	Delegatif	Tinggi
2	Kota Sabang	6,10%	Instruktif	Rendah sekali
3	Kota Banda Aceh	9,99%	Instruktif	Rendah sekali
4	Kabupaten Bireuen	3,73%	Instruktif	Rendah sekali
5	Kabupaten Aceh Besar	4,35%	Instruktif	Rendah sekali
6	Kabupaten Aceh Barat	6,78%	Instruktif	Rendah sekali
7	Kabupaten Aceh Selatan	3,92%	Instruktif	Rendah sekali
8	Kota Langsa	6,02%	Instruktif	Rendah sekali
9	Kabupaten Gayo Lues	1,72%	Instruktif	Rendah sekali
10	Kabupaten Aceh Utara	49,61%	Konsultatif	Rendah
11	Kabupaten Aceh Tenggara	3,01%	Instruktif	Rendah sekali
12	Kabupaten Aceh Tengah	5,78%	Instruktif	Rendah sekali
13	Kabupaten Aceh Tamiang	7,50%	Instruktif	Rendah sekali
14	Kabupaten Simeulue	2,99%	Instruktif	Rendah sekali

Sumber : Data Sekunder LKPD TA 2007 yang diolah.

### Hasil Analisis Data

Pengujian pengaruh likuiditas dengan rasio lancar ( $X_1$ ) dan *leverage* ( $X_2$ ) terhadap kemandirian daerah ( $Y$ ) dalam penelitian ini digunakan analisis regresi berganda yang distandarkan atau analisis jalur dengan metode sensus. Berhubung penelitian ini menggunakan metode sensus, maka untuk pengujian hipotesis tidak dilakukan uji signifikansi, baik uji- $t$  (untuk pengaruh secara parsial) maupun uji- $F$  (untuk pengaruh secara bersama-sama). Analisis jalur dalam metode sensus digunakan untuk mendapatkan nilai-nilai koefisien jalur dan koefisien determinasi yang sesungguhnya (Arfan, 2006:151).

Koefisien jalur digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan untuk mengetahui besarnya (kuat-lemahnya) pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun secara bersama-sama atau simultan ditunjukkan oleh koefisien determinasi. Oleh karena itu, koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar (dalam persentase) variabel independen, baik secara parsial maupun secara bersama-sama atau simultan dapat menentukan atau menjelaskan variasi variabel dependen.

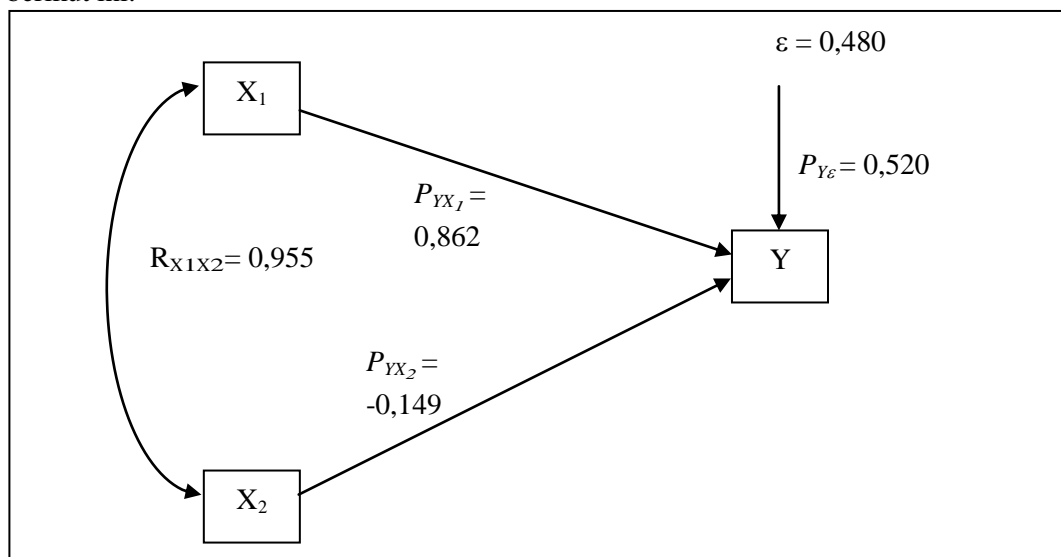
Berdasar data yang akan diolah pada Tabel 3, maka dapat diketahui bahwa data tersebut bervariasi hingga cenderung ekstrim. Oleh karena itu sebelum dilakukan pengolahan data, maka sebelumnya diperlukan pengujian data outlier. Data outlier adalah data yang secara nyata berbeda dengan data-data yang lain dan dapat terjadi karena salah satunya

memang terdapat data-data ekstrim yang tidak dapat dihindarkan keberadaannya (Santoso, 2002:23).

Pengujian terhadap keberadaan data outlier ini dilakukan dengan bantuan *SPSS* mencari standarisasi data yakni berupa nilai  $z$ . Deteksi outlier dilakukan adalah jika sebuah data outlier, maka nilai  $z$  yang didapat lebih besar dari angka  $+2,5$  atau lebih kecil dari angka  $-2,5$  (Santoso, 2002:23). Hasil uji data outlier pada Lampiran 2 menunjukkan bahwa data Nomor 6 adalah outlier yakni nilai  $z$  variabel  $X_1$  sebesar 3,44836 dan nilai  $z$  variabel  $X_2$  sebesar 3,47409. Atas dasar tersebut maka data Nomor 6 dihilangkan karena dianggap tidak mencerminkan sebaran data yang sesungguhnya, sehingga jumlah data yang diolah adalah sebanyak 13 sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 2.

Pada Tabel 3 dan Tabel 4 diketahui bahwa data absolut tersebut memiliki perbedaan, sehingga untuk memperkecil perbedaan tersebut diperlukan transformasi data ke dalam bentuk logaritma. Model yang tidak linier baik variabel maupun parameternya dapat ditransformasikan sehingga berbentuk linier dengan tujuan agar teori-teori dapat digunakan dari cara mengestimasi koefisien regresi sampai dengan cara menginterpretasikan model yang didapat, salah satunya ke dalam bentuk logaritma (Nachrowi, 2002:82). Hasil perhitungan ke dalam bentuk logaritma dilakukan dengan bantuan aplikasi *excel* dapat dilihat pada Lampiran 2.

Hasil perhitungan dari pengolahan data setelah dilakukan uji data outlier dan transformasi data ke dalam bentuk logaritma, menggunakan bantuan aplikasi *software SPSS* (*Statistical Product and Service Solution* yang sebelumnya disebut *Statistical Package for the Social Sciences*) versi 12 dengan analisis jalur secara ringkas dapat dilihat pada Gambar berikut ini.



Gambar 3 : Hasil Analisis Jalur Atas Pengaruh Likuiditas Rasio Lancar ( $X_1$ ) dan *Leverage* ( $X_2$ ) terhadap Kemandirian Daerah ( $Y$ ).

Keterangan gambar:

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| $Y$                       | = Kemandirian Daerah (variabel dependen)                |
| $P_{YX_1}$ dan $P_{YX_2}$ | = Koefisien regresi yang distandarkan (koefisien jalur) |
| $X_1$                     | = Likuiditas rasio lancar                               |
| $X_2$                     | = <i>Leverage</i>                                       |
| $\varepsilon$             | = Epsilon / Variabel lain yang mempengaruhi $Y$         |
- } (variabel independen)

→ = Pengaruh

Berdasarkan hasil perhitungan dari pengolahan data menggunakan bantuan aplikasi *software SPSS* versi 12 dengan analisis jalur pada Gambar 3 tersebut maka dapat diperoleh model persamaan struktural untuk diagram jalur sebagai berikut.

$$Y = 0,862X_1 - 0,149X_2 + \varepsilon$$

### **Pengaruh Likuiditas Rasio Lancar dan *Leverage* Secara Bersama-sama terhadap Kemandirian Daerah**

#### **Hasil Pengujian Hipotesis**

Hipotesis pertama ( $H_1$ ), yaitu pengaruh likuiditas dengan rasio lancar ( $X_1$ ) dan *leverage* ( $X_2$ ) secara bersama-sama terhadap kemandirian daerah ( $Y$ ), dirumuskan sebagai berikut:

$H_{01}$ :  $R^2 = 0$ ; Likuiditas rasio lancar dan *leverage* secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kemandirian daerah.

$H_{A1}$ :  $R^2 \neq 0$ ; Likuiditas rasio lancar dan *leverage* secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemandirian daerah.

Hasil perhitungan dari pengolahan data dengan menggunakan bantuan aplikasi *software SPSS* versi 12 dapat ditunjukkan pada lampiran 3 yakni nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) atau pada kolom *R Square* diketahui bahwa pengaruh likuiditas dengan rasio lancar ( $X_1$ ) dan *leverage* ( $X_2$ ) secara bersama-sama terhadap kemandirian daerah ( $Y$ ) adalah tidak sama dengan nol ( $R^2 \neq 0$ ). Berdasarkan hipotesis pertama ( $H_1$ ) bahwa kriteria untuk menyatakan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen adalah pada saat  $R^2 \neq 0$ . Atas hal tersebut dapat diketahui bahwa hipotesis nol pertama ( $H_{01}$ ) ditolak. Oleh karena itu hipotesis alternatif pertama ( $H_{A1}$ ) tidak dapat ditolak atau *not rejected* yang berarti bahwa likuiditas rasio lancar dan *leverage* secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemandirian daerah.

Pada Lampiran 3 tersebut menunjukkan koefisien determinasi diperoleh nilai  $R^2$  atau *R Square* adalah 0,520 atau sebesar 52,0%. Hal tersebut berarti 52,0% variasi variabel dependen berupa kemandirian daerah ditentukan secara bersama-sama oleh variabel independen berupa likuiditas dengan rasio lancar dan *leverage*, sehingga menunjukkan bahwa pengaruh likuiditas dengan rasio lancar ( $X_1$ ) dan *leverage* ( $X_2$ ) secara bersama-sama terhadap kemandirian daerah ( $Y$ ) adalah sebesar 52,0%.

Perhitungan besar pengaruh secara simultan tersebut selain dari pengaruh langsung juga harus memperhitungkan pengaruh tidak langsungnya. Hal tersebut dilakukan karena terdapatnya hubungan yang sangat erat antara variabel likuiditas rasio lancar ( $X_1$ ) dan *leverage* ( $X_2$ ) yang ditunjukkan oleh angka *pearson correlation* sebesar 0,955. Perhitungan pengaruh langsung dan tidak langsung antara likuiditas dengan rasio lancar ( $X_1$ ) dan *leverage* ( $X_2$ ) secara simultan terhadap kemandirian daerah ( $Y$ ) dapat dibuktikan pada Tabel 5 berikut ini.

**Tabel 6**  
**Perhitungan Besar Pengaruh Simultan Antara**  
**Likuiditas ( $X_1$ ) Dan *Leverage* ( $X_2$ ) Terhadap Kemandirian Daerah ( $Y$ )**  
**Secara Langsung Dan Tidak Langsung**

Variabel	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung	TOTAL
$X_1$ ke $Y$	$(0,862)^2 \times 100\%$		74,3 %



$X_2$ ke Y	$(-0,149)^2 \times 100\%$		2,2 %
$X_1$ ke Y melalui $X_2$		$2(0,862 \times -0,149 \times 0,955) \times 100\%$	- 24,5 %
<b>Besar Pengaruh Secara Simultan</b>			<b>52,0 %</b>

Sumber : Diolah dari hasil analisis statistik dengan SPSS Lampiran 3.

### Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas dengan rasio lancar ( $X_1$ ) dan *leverage* ( $X_2$ ) secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemandirian daerah (Y). Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) atau *R Square* yang tidak sama dengan 0 (nol), yakni 0,520 atau sebesar 52,0%. Hal tersebut berarti 52,0% variasi variabel dependen berupa kemandirian daerah ditentukan secara bersama-sama oleh variabel independen berupa likuiditas dengan rasio lancar dan *leverage*, sehingga menunjukkan bahwa pengaruh likuiditas dengan rasio lancar ( $X_1$ ) dan *leverage* ( $X_2$ ) secara bersama-sama terhadap kemandirian daerah (Y) adalah sebesar 52,0%.

Mengacu pada teori yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat kerangka pemikiran logis tentang pengaruh likuiditas dan *leverage* terhadap kemandirian daerah, jika dipandang dari sisi keberadaan utang atau pinjaman sebagai sumber pendanaan eksternal pemda.

Salah satu indikator pengukuran likuiditas adalah menggunakan rasio lancar yang menunjukkan perbandingan antara aktiva lancar (di luar persediaan) dengan utang jangka pendek. Perhitungan rasio *leverage* pada suatu pemerintah daerah digunakan untuk mengukur perbandingan antara ekuitas dana (kekayaan bersih pemerintah daerah) dengan total utang. Rasio kemandirian sebagai indikator pengukuran kemandirian daerah dapat menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Sumber dana eksternal yang dimaksud selain DAU adalah unsur pinjaman yang harus turut diperhitungkan selain Utang PFK dan Utang Pajak Pusat sebab kedua jenis utang tersebut tidak dimaksudkan untuk menambah sumber pendanaan pada pemerintah daerah (STAN, 2007:108).

Berdasar uraian tersebut maka dapat dijelaskan bahwa hasil pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini sejalan dan dapat mendukung teori yakni terdapatnya pengaruh likuiditas dengan rasio lancar dan *leverage* secara bersama-sama terhadap kemandirian daerah.

### Pengaruh Parsial Likuiditas Rasio Lancar terhadap Kemandirian Daerah

#### Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis kedua ( $H_2$ ), yaitu pengaruh parsial likuiditas dengan rasio lancar ( $X_1$ ) terhadap kemandirian daerah (Y), dirumuskan sebagai berikut:

$H_{02} : P_{YX1} = 0$ ; Likuiditas rasio lancar tidak berpengaruh terhadap kemandirian daerah.

$H_{A2} : P_{YX1} \neq 0$ ; Likuiditas rasio lancar berpengaruh terhadap kemandirian daerah.

Hasil perhitungan dari pengolahan data dengan bantuan aplikasi *software SPSS* versi 12 untuk menguji hipotesis kedua tersebut dapat ditunjukkan pada Lampiran 3 yakni nilai koefisien jalur masing-masing variabel independen dapat diperoleh dengan *output coefficients* pada kolom *standardized coefficients* (beta). Nilai koefisien jalur pengaruh parsial likuiditas dengan rasio lancar ( $X_1$ ) terhadap kemandirian daerah (Y) adalah tidak sama dengan nol ( $P_{YX1} \neq 0$ ). Berdasarkan hipotesis kedua ( $H_2$ ) bahwa kriteria untuk menyatakan bahwa variabel independen berupa likuiditas rasio lancar secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen berupa kemandirian daerah apabila  $P_{YX1} \neq 0$ . Atas

hal tersebut dapat diketahui bahwa hipotesis nol kedua ( $H_{02}$ ) ditolak. Oleh karena itu hipotesis alternatif kedua ( $H_{A2}$ ) tidak dapat ditolak atau *not rejected* yang berarti bahwa likuiditas rasio lancar secara parsial berpengaruh terhadap kemandirian daerah.

Sehubungan dalam penelitian ini digunakan metode sensus, maka pengujian signifikansi terhadap nilai koefisien jalur tersebut tidak dilakukan. Hal tersebut dikarenakan nilai koefisien jalur yang diperoleh sudah merupakan nilai koefisien jalur yang sesungguhnya dari populasi. Pada Lampiran 3 menunjukkan nilai koefisien jalur pengaruh parsial likuiditas dengan rasio lancar ( $X_1$ ) terhadap kemandirian daerah (Y) pada kolom *standardized coefficients* (beta) adalah  $P_{YX1} = 0,862$ .

### Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua pada penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas dengan rasio lancar ( $X_1$ ) secara parsial berpengaruh terhadap kemandirian daerah (Y) dengan ditunjukkan oleh nilai koefisien jalur  $P_{YX1} = 0,862$ . Atas dasar hal tersebut maka besar pengaruh likuiditas dengan rasio lancar ( $X_1$ ) secara parsial terhadap kemandirian daerah (Y) dapat dihitung sebesar  $[(0,862)^2 \times 100\%] = 74,3\%$ .

Mengacu pada teori yang telah dijelaskan bahwa salah satu indikator pengukuran likuiditas adalah menggunakan rasio lancar yang menunjukkan perbandingan antara aktiva lancar (di luar persediaan) dengan utang jangka pendek. Rasio kemandirian sebagai indikator pengukuran kemandirian daerah dapat menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Sumber dana eksternal yang dimaksud selain DAU adalah unsur pinjaman yang harus turut diperhitungkan selain Utang PFK dan Utang Pajak Pusat sebab kedua jenis utang tersebut tidak dimaksudkan untuk menambah sumber pendanaan pada pemerintah daerah (STAN, 2007:108).

Berdasar uraian tersebut maka dapat dijelaskan bahwa hasil pengujian hipotesis kedua dalam penelitian ini sejalan dan dapat mendukung teori yakni terdapatnya pengaruh likuiditas dengan rasio lancar secara parsial terhadap kemandirian daerah.

### Pengaruh Parsial *Leverage* Terhadap Kemandirian Daerah

#### Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis ketiga ( $H_3$ ), yaitu pengaruh parsial *leverage* ( $X_2$ ) terhadap kemandirian daerah (Y), dirumuskan sebagai berikut:

$H_{03} : P_{YX2} = 0$ ; *Leverage* tidak berpengaruh terhadap kemandirian daerah.

$H_{A3} : P_{YX2} \neq 0$ ; *Leverage* berpengaruh terhadap kemandirian daerah.

Hasil perhitungan dari pengolahan data dengan menggunakan bantuan aplikasi *software SPSS* versi 12 yang ditunjukkan pada Lampiran 3 dapat diketahui bahwa nilai koefisien jalur masing-masing variabel independen dapat diperoleh melalui *output coefficients* pada kolom *standardized coefficients* (beta). Nilai koefisien jalur pengaruh parsial *leverage* ( $X_2$ ) terhadap kemandirian daerah (Y) adalah tidak sama dengan nol ( $P_{YX2} \neq 0$ ). Berdasarkan hipotesis ketiga ( $H_3$ ) bahwa kriteria untuk menyatakan bahwa variabel independen berupa *leverage* secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen berupa kemandirian daerah adalah pada saat  $P_{YX2} \neq 0$ .

Atas hal tersebut dapat diketahui bahwa hipotesis nol ketiga ( $H_{03}$ ) ditolak. Oleh karena itu hipotesis alternatif ketiga ( $H_{A3}$ ) tidak dapat ditolak atau *not rejected* yang berarti bahwa *leverage* secara parsial berpengaruh terhadap kemandirian daerah. Pada Lampiran 3 menunjukkan nilai koefisien jalur pengaruh parsial *leverage* ( $X_2$ ) terhadap kemandirian daerah (Y) pada kolom *standardized coefficients* (beta) adalah  $P_{YX2} = -0,149$ .

## Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga pada penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage* ( $X_2$ ) secara parsial berpengaruh terhadap kemandirian daerah (Y) dengan ditunjukkan oleh nilai koefisien jalur pada kolom *standardized coefficients* (beta) yakni  $P_{YX_2} = -0,149$ . Atas dasar hal tersebut maka besar pengaruh *leverage* ( $X_2$ ) secara parsial berpengaruh terhadap kemandirian daerah (Y) dapat dihitung sebesar  $[(-0,149)^2 \times 100\%] = 2,2\%$ .

Mengacu pada teori yang telah dijelaskan bahwa perhitungan rasio *leverage* pada suatu pemerintah daerah digunakan untuk mengukur perbandingan antara ekuitas dana (kekayaan bersih pemerintah daerah) dengan total utang. Rasio kemandirian sebagai indikator pengukuran kemandirian daerah dapat menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Sumber dana eksternal yang dimaksud selain DAU adalah unsur pinjaman yang harus turut diperhitungkan selain Utang PFK dan Utang Pajak Pusat sebab kedua jenis utang tersebut tidak dimaksudkan untuk menambah sumber pendanaan pada pemerintah daerah (STAN, 2007:108).

Berdasar uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa hasil pengujian hipotesis ketiga yakni terdapatnya pengaruh *leverage* secara parsial terhadap kemandirian daerah menunjukkan angka sangat kecil sebesar 2,2%. Hal tersebut berarti menunjukkan bahwa telah sesuai atau sejalan dengan teori namun prosentasenya sangat kecil dalam menjelaskan dan mendukung teori tersebut. Hal ini cenderung disebabkan pada pemerintah daerah rasio *leverage* belum bahkan tidak merupakan rasio yang penting (STAN, 2007:108).

## Pengaruh Variabel Lain Terhadap Kemandirian Daerah

Berdasarkan hasil olahan SPSS versi 12 yang ditunjukkan pada Lampiran 3 dapat diketahui bahwa pengaruh likuiditas dengan rasio lancar ( $X_1$ ) dan *leverage* ( $X_2$ ) secara bersama-sama terhadap kemandirian daerah (Y) adalah tidak sama dengan nol ( $R^2 \neq 0$ ). Nilai koefisien determinasi ditunjukkan dari *R Square* adalah 0,520 atau  $R^2 = 52,0\%$ . Melalui rumus  $\varepsilon = 1 - R^2$  maka diketahui perhitungan sebagai berikut:

$$\varepsilon = 1 - 52,0\%$$

$$\varepsilon = 48,0\%$$

Hal tersebut berarti bahwa pengaruh likuiditas dengan rasio lancar ( $X_1$ ) dan *leverage* ( $X_2$ ) secara bersama-sama terhadap kemandirian daerah (Y) adalah sebesar 52,0% sedangkan variabel-variabel independen lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini yang mempengaruhi variabel dependen berupa kemandirian daerah adalah sebesar 48,0%. Atau dengan kata lain, sebesar 52,0% variabel dependen berupa kemandirian daerah (Y) dipengaruhi secara bersama-sama oleh variabel independen berupa likuiditas dengan rasio lancar ( $X_1$ ) dan *leverage* ( $X_2$ ). Sisanya sebesar 48,0% kemandirian daerah dipengaruhi oleh variabel-variabel independen lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh likuiditas dengan rasio lancar ( $X_1$ ) dan *leverage* ( $X_2$ ) terhadap kemandirian daerah (Y), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Likuiditas dengan rasio lancar dan *leverage* secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemandirian daerah pada pemerintah daerah dalam wilayah Provinsi Aceh sebesar 52,0%.
- 2) Likuiditas dengan rasio lancar secara parsial berpengaruh terhadap kemandirian daerah pada pemerintah daerah dalam wilayah Provinsi Aceh sebesar 74,3%.
- 3) *Leverage* secara parsial berpengaruh terhadap kemandirian daerah pada pemerintah daerah dalam wilayah Provinsi Aceh hanya sebesar 2,2%.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

- 1) Saran Operasional
  - a) Disarankan kepada pemda baik di tingkat provinsi, kota maupun kabupaten di wilayah Provinsi Aceh agar senantiasa berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya pada tahun-tahun berikutnya karena pada TA 2007 tingkat kemandirian daerah masih rendah.
  - b) Disarankan kepada entitas pemerintahan khususnya dinas yang mengelola keuangan pemda untuk dapat mengembangkan analisis rasio keuangan khusus pemerintahan yang dapat diterapkan untuk pengukuran kinerja keuangan pemerintahannya sehingga dapat diketahui tingkatan kemandirian daerahnya guna memacu peningkatan pembangunan.
- 2) Saran Keilmuan  
 Disarankan bagi penelitian selanjutnya agar meneliti atau mencari dan menambah variabel-variabel lain yang dapat menjelaskan atau mempengaruhi kemandirian daerah tersebut, misalnya PAD, DAU dan utang pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arfan, Muhammad. 2006. *Pengaruh Arus Kas Bebas, Set Kesempatan Investasi Dan Financial Leverage Terhadap Manajemen Laba*. Disertasi Tidak Diterbitkan. Pascasarjana Unsyiah, Banda Aceh.
- Avianti, Ilya. 2000. *Model Prediksi Kepailitan Emiten di Bursa Efek Jakarta dengan Menggunakan Indikator-indikator Keuangan*. Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Dwirandra, A.A.N.B. (2006). *Efektifitas Dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota Di Propinsi Bali Tahun 2002-2006*. Artikel 2006.
- Halim, Abdul. 2001. *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

- Hamzah, Ardi (2007). *Analisis Rasio Likuiditas, Profitabilitas, Aktivitas, Solvabilitas dan Invesment Opportunity Set Dalam Tahapan Siklus Kehidupan Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) Tahun 2001-2005*. Artikel 2007.
- \_\_\_\_\_ (2008). *Analisa Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur (Studi pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Propinsi Jawa Timur periode 2001-2006)*. SNA XI Pontianak 2008.
- Haryanto, Joko Tri (2007). *Kemandirian Daerah Sebuah Perspektif Dengan Metode Path Analysis*. Artikel 2007.
- \_\_\_\_\_ (2007). *Potret PAD Dan Relevansinya Terhadap Kemandirian Daerah*. <<http://www.depkeu.go.id>> [3 Agustus 2009]
- Hernawati, Ima (2007). *Analisis Pengaruh Efisiensi Modal Kerja, Likuiditas dan Solvabilitas Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Industri Barang Konsumsi Di Bursa Efek Jakarta)*. Skripsi Tahun 2007.
- Keban, T. Yermias (2008). “Good Governance” dan “Capacity Building” sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintah. <<http://www.bappenas.go.id/index.php>> [8 Desember 2008]
- Li, Ching Chun. 1975. *Path Analysis: A Primer*. Pacific Grove, CA: Boxwood Press.
- Loether, Herman J. dan Donald G. McTavish. 1993. *Descriptive and Inferential Statistics: An Introduction*. 4<sup>th</sup> Edition. Singapore: Allyn and Bacon.
- Mutiarni (2008). *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Unsyiah Tahun 2008.
- Nachrowi, Djalal. 2002. *Penggunaan Teknik Ekonometri*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nadaek, Ruslina (2003). *Analisis Rasio Keuangan APBD Untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kabupaten Maluku Tenggara)*. Skripsi Tahun 2003.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. *Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta. Komite Standar Akuntansi Pemerintah. (Khusus kalangan sendiri).
- Prasetya, Gede Edy. 2005. *Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi I. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Santoso, Singgih. 2002. *Buku Latihan SPSS Statistik Multivariat*. Edisi II. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sarwono, Jonathan. 2007. *Analisis Jalur untuk Riset Bisnis dengan SPSS: Aplikasi dalam Riset Pemasaran, Keuangan, Manajemen Sumber Daya Manusia dan Kewirausahaan*. Edisi I. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods For Business*. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Buku 1 Edisi 4. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Research Methods For Business*. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Buku 2 Edisi 4. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. 1992. *Research Methods For Business (A Skill Building Approach)*. Second Edition. John Wiley & Sons. New York.
- Soepomo, Mulyono (2007). *Redefinisi Akuntan Sektor Publik dalam Upaya Penciptaan Good Government*. Makalah, Kongres Nasional Akuntan Indonesia IV. Jakarta.
- Suprpto, Tri (2006). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Dalam Masa Otonomi Daerah Tahun 2000-2004*. Skripsi Tahun 2006.

Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Daerah*. Cetakan Pertama. Tangerang: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara/STAN.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. *Pemerintah Daerah*.

\_\_\_\_\_ Nomor 33 Tahun 2004. *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.

\_\_\_\_\_ Nomor 17 Tahun 2003. *Keuangan Negara*. Tim Sosialisasi UU BPK Tahun 2006.

\_\_\_\_\_ Nomor 1 Tahun 2004. *Perbendaharaan Negara*. Tim Sosialisasi UU BPK Tahun 2006.

\_\_\_\_\_ Nomor 15 Tahun 2004. *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. Tim Sosialisasi UU BPK Tahun 2006.

## Lampiran 1

### DATA THESIS

NO	PEMERINTAH DAERAH	AktivaLancar	Persediaan	UtangJgkPendek	Kas&SetaraKas	TotalAktiva	TotalUtang	TotalEkuitasDana	RealisasiPAD	DanaAlokasiUmum	UtangPFK	UtangPajakPusat
1	Provinsi NAD	3,204,295,794,037.65	8,632,827,089.00	3,226,987,742.25	3,141,732,121,604.66	11,933,612,207,496.20	3,226,987,742.25	11,930,385,219,753.90	587,487,310,959.13	487,934,000,000.00	-	-
2	Kota Sabang	89,587,813,611.23	2,738,130,893.00	697,702,720.00	75,862,647,671.34	714,076,336,855.23	697,702,720.00	713,378,634,135.23	10,494,114,371.66	171,896,000,000.00	697,702,720.00	-
3	Kota Banda Aceh	45,261,493,005.00	2,866,165,355.00	3,427,652,815.00	40,698,516,225.00	2,167,037,034,864.00	3,427,652,815.00	2,163,609,382,049.00	30,859,032,422.00	308,839,000,003.00	-	3,427,652,815.00
4	Kabupaten Bireuen	75,081,034,572.13	3,252,196,518.00	64,444,996,575.90	46,916,170,336.13	1,377,599,428,558.72	64,444,996,575.90	1,313,154,431,982.82	15,016,517,358.68	345,885,000,000.00	7,655,022,535.90	-
5	Kabupaten Aceh Besar	58,058,135,310.00	1,546,341,776.00	7,040,043,402.00	55,569,585,925.00	864,140,253,916.00	7,040,043,402.00	857,100,210,514.00	14,603,814,302.00	335,436,000,000.00	98,700,665.00	6,941,342,737.00
6	Kabupaten Aceh Barat	109,018,783,492.70	-	4,535,772.00	109,018,783,492.70	2,603,290,688,804.70	4,535,772.00	2,603,286,153,032.70	18,114,831,447.00	267,201,000,000.00	4,535,772.00	-
7	Kabupaten Aceh Selatan	70,454,658,016.04	-	20,408,664,889.00	70,088,847,921.04	967,699,032,937.04	21,355,417,831.00	946,343,615,106.04	11,678,684,169.61	277,662,996,000.00	304,081,602.00	1,015,942,708.00
8	Kota Langsa	20,111,486,712.11	860,552,947.00	5,183,466,981.82	17,947,861,705.11	563,774,647,666.14	7,382,044,233.62	556,392,603,432.52	11,539,108,917.00	184,332,000,000.00	4,077,273.00	-
9	Kabupaten Gayo Lues	45,568,519,436.49	-	44,793,459,187.00	23,976,906,110.49	488,432,050,056.49	44,793,459,187.00	443,638,590,869.49	4,167,172,636.49	200,632,000,000.00	3,517,111,651.00	-
10	Kabupaten Aceh Utara	1,230,599,257,503.62	5,020,148,183.00	423,035,502.22	1,222,996,357,184.62	2,879,282,596,529.42	423,035,502.22	2,878,859,561,027.20	101,357,843,058.18	203,868,000,000.00	-	-
11	Kabupaten Aceh Tenggara	27,523,791,789.00	-	36,302,532,195.64	17,045,380,614.27	708,161,319,171.00	37,322,087,751.21	670,839,231,419.79	8,618,208,807.00	252,480,000,000.00	3,235,856,873.00	-
12	Kabupaten Aceh Tengah	32,927,106,798.00	-	110,193,724.00	32,908,681,798.00	714,917,262,668.00	557,093,860.00	714,360,168,808.00	15,871,245,889.00	274,186,000,400.00	-	63,151,604.00
13	Kabupaten Aceh Tamiang	204,285,593,277.00	757,271,649.00	6,589,787,767.00	203,528,321,628.00	577,163,001,768.00	6,589,787,767.00	570,573,214,001.00	15,999,885,399.00	213,427,999,992.00	-	6,589,787,767.00
14	Kabupaten Simeulue	44,683,425,871.00	-	150,000,000.00	44,683,425,871.00	595,013,456,260.00	150,000,000.00	594,863,456,260.00	5,523,865,820.00	184,733,000,000.00	-	-

**Lampiran 2**

**DATA THESIS**

NO	PEMERINTAH DAERAH	DATA ASAL		
		RasioLancar	RasioLeverage	RasioKemandirian
1	Provinsi NAD	990,29	3.697,07	1,20
2	Kota Sabang	124,48	1.022,47	0,06
3	Kota Banda Aceh	12,37	631,22	0,10
4	Kabupaten Bireuen	1,11	20,38	0,04
5	Kabupaten Aceh Besar	8,03	121,75	0,04
6	Kabupaten Aceh Barat	24.035,33	573.945,55	0,07
7	Kabupaten Aceh Selatan	3,45	44,31	0,04
8	Kota Langsa	3,71	75,37	0,06
9	Kabupaten Gayo Lues	1,02	9,90	0,02
10	Kabupaten Aceh Utara	2.897,11	6.805,24	0,50
11	Kabupaten Aceh Tenggara	0,76	17,97	0,03
12	Kabupaten Aceh Tengah	298,81	1.282,30	0,06
13	Kabupaten Aceh Tamiang	30,89	86,58	0,07
14	Kabupaten Simeulue	297,89	3.965,76	0,03



# UJI DATA OUTLIER

	X1	X2	ZX1	ZX2
1	990,29	3697,07	-,16628	-,25202
2	124,48	1022,47	-,30208	-,26949
3	12,37	631,22	-,31966	-,27205
4	1,11	20,38	-,32143	-,27604
5	8,03	121,75	-,32034	-,27538
6	24035,33	573945,55	3,44836	3,47409
7	3,45	44,31	-,32106	-,27588
8	3,71	75,37	-,32102	-,27568
9	1,02	9,90	-,32144	-,27611
10	2897,11	6805,24	,13281	-,23171
11	,76	17,97	-,32148	-,27606
12	298,81	1282,30	-,27473	-,26780
13	30,89	86,58	-,31676	-,27561
14	297,89	3965,76	-,27488	-,25026

**DATA THESIS**

NO	PEMERINTAH DAERAH	TRANSFORMASI - LOG		
		RasioLancar	RasioLeverage	RasioKemandirian
1	Provinsi NAD	6,90	8,22	0,18
2	Kota Sabang	4,82	6,93	(2,80)
3	Kota Banda Aceh	2,52	6,45	(2,30)
4	Kabupaten Bireuen	0,11	3,01	(3,29)
5	Kabupaten Aceh Besar	2,08	4,80	(3,13)
6	Kabupaten Aceh Selatan	1,24	3,79	(3,24)
7	Kota Langsa	1,31	4,32	(2,81)
8	Kabupaten Gayo Lues	0,02	2,29	(4,06)
9	Kabupaten Aceh Utara	7,97	8,83	(0,70)
10	Kabupaten Aceh Tenggara	(0,28)	2,89	(3,50)
11	Kabupaten Aceh Tengah	5,70	7,16	(2,85)
12	Kabupaten Aceh Tamiang	3,43	4,46	(2,59)
13	Kabupaten Simeulue	5,70	8,29	(3,51)

DATA INPUT SPSS SETELAH MEMBUANG OUTLIER & TRANSFORMASI LOG

	X1	X2	Y
1	6,90	8,22	,18
2	4,82	6,93	-2,80
3	2,52	6,45	-2,30
4	,11	3,01	-3,29
5	2,08	4,80	-3,13
6	1,24	3,79	-3,24
7	1,31	4,32	-2,81
8	,02	2,29	-4,06
9	7,97	8,83	-,70
10	-,28	2,89	-3,50
11	5,70	7,16	-2,85
12	3,43	4,46	-2,59
13	5,70	8,29	-3,51

## Lampiran 3

### Regression

**Variables Entered/Removed<sup>a</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Leverage, Likuiditas Rasio <sup>a</sup> Lancar	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Kemandirian Daerah

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,721 <sup>a</sup>	,520	,424	,88918

a. Predictors: (Constant), Leverage, LikuiditasRasioLancar

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8,556	2	4,278	5,411	,026 <sup>a</sup>
	Residual	7,906	10	,791		
	Total	16,463	12			

a. Predictors: (Constant), Leverage, LikuiditasRasioLancar

b. Dependent Variable: Kemandirian Daerah

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3,398	1,220		-2,785	,019
	LikuiditasRasioLancar	,364	,312	,862	1,166	,270
	Leverage	-,077	,384	-,149	-,202	,844

a. Dependent Variable: Kemandirian Daerah

### Correlations

**Correlations**

		Likuiditas RasioLancar	Leverage
LikuiditasRasioLancar	Pearson Correlation	1	,955**
	Sig. (2-tailed)	.	,000
	N	13	13
Leverage	Pearson Correlation	,955**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	.
	N	13	13

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).